

**SKRIPSI**

**PENYIMPANGAN KONSEP PEMBATAAN KEKUASAAN MELALUI INTERVENSI  
TERHADAP YUDIKATIF : PERBANDINGAN KASUS PEMBERHENTIAN HAKIM  
KONSTITUSI DI INDONESIA, UKRAINA DAN TURKI**

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**Oleh:**

**FABRIZIO SANDY ABHISTA**  
**2010111020**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)**

**Pembimbing:**

**Arfiani, S.H.,M.H**

**Ilhamdi Putra, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2025**

# **PENYIMPANGAN KONSEP PEMBATASAN KEKUASAAN MELALUI INTERVENSI YUDIKATIF: STUDI PERBANDINGAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA, UKRAINA DAN TURKI**

Fabrizio Sandy Abhista, NIM: 2010111020, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025.

## **ABSTRAK**

Konsep pemisahan kekuasaan dan *check and balance* melarang intervensi lembaga negara terhadap lembaga negara lain, khususnya intervensi terhadap independensi lembaga yudikatif. Konsep pemisahan kekuasaan telah diadopsi oleh Indonesia, Ukraina dan Turki, namun faktanya terdapat intervensi yang menjurus kepada pelanggaran independensi hakim, khususnya mengenai pemecatan Hakim Konstitusi dalam masa jabatannya yang dipenuhi nuansa politis yang merugikan prinsip-prinsip demokratis dan independensi peradilan. Adapun rumusan masalah di dalam skripsi ini yaitu: Pertama, bagaimana pola dari intervensi pemerintah dalam kasus pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya di Indonesia, Ukraina dan Turki. Kedua, apa penyebab intervensi pemerintah dalam kasus pemberhentian Hakim Konstitusi di Indonesia, Ukraina dan Turki. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pertama, adanya pola-pola tertentu yang digunakan oleh cabang kekuasaan lain dalam mengintervensi lembaga peradilan khususnya dalam pemecatan Hakim Konstitusi. Di Indonesia, pemecatan hakim Aswanto mencerminkan ketidakpuasan DPR akan putusan yang tidak sejalan dengan kepentingan legislatif, menunjukkan adanya dasar politis dalam keputusan tersebut serta terdapat penyimpangan prosedural dalam pemecatan hakim Aswanto sehingga dapat dikategorikan sebagai inkonstitusional. Di Ukraina, Tindakan Presiden dalam memberhentikan hakim Tupitskyi merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan melangkaui pembatasan kekuasaan yang tercantum di dalam konstitusi. Sementara itu, di Turki, pemecatan hakim Alparslan dan Erdal terkait dugaan keterlibatan dalam kelompok teroris tidak berdasar kepada bukti yang kuat dan menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan serta penekanan kepada lembaga yudkiatif dengan dalih menjaga keamanan negara. Kedua, intervensi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yakni kontestasi politik yang tidak seimbang, tidak efektifnya mekanisme *check and balances* antar lembaga negara, adanya peraturan perundang-undangan yang berpotensi inkonstitusional, hingga lemahnya kesadaran cabang kekuasaan lain akan *constitutional ethics* sehingga dapat mengintervensi yudikatif dan melampaui pembatasan kewenangan pemerintah yang terkandung di dalam konstitusi masing-masing negara.

# **DEVIATION OF THE CONCEPT OF LIMITATION OF POWER THROUGH JUDICIAL INTERVENTION: A COMPARATIVE STUDY OF THE DISMISSAL OF CONSTITUTIONAL JUDGES IN INDONESIA, UKRAINE AND TURKEY**

Fabrizio Sandy Abhista, NIM: 2010111020, Bachelor of Law Programme, Faculty of Law, Universitas Andalas, 2025.

## **ABSTRACT**

The concept of separation of powers and checks and balances prohibits the intervention of state institutions into other state institutions, especially intervention into the independence of the judiciary. The concept of separation of powers has been adopted by Indonesia, Ukraine and Turkey, but in fact there are interventions that lead to violations of the independence of judges, especially regarding the dismissal of Constitutional Judges during their term of office which is filled with political nuances that are detrimental to democratic principles and judicial independence. The problem formulations in this thesis are: First, what is the pattern of government intervention in cases of dismissal of constitutional judges in their term of office in Indonesia, Ukraine and Turkey. Second, what are the causes of government intervention in cases of dismissal of constitutional judges in Indonesia, Ukraine and Turkey. This study uses normative legal research methods, with library data collection techniques. The conclusions of this study are: First, there are certain patterns used by other branches of power in intervening in the judiciary, especially in the dismissal of Constitutional Judges. In Indonesia, the dismissal of Judge Aswanto reflects the dissatisfaction of the House of Representatives with a decision that is not in line with the interests of the legislature, shows a political basis in the decision and there are procedural irregularities in the dismissal of Judge Aswanto so that it can be categorised as unconstitutional. In Ukraine, the President's action in dismissing Judge Tupitskyi was arbitrary and exceeded the limitations on power set out in the constitution. Meanwhile, in Turkey, the dismissal of judges Alparslan and Erdal for alleged involvement in a terrorist group was not based on strong evidence and demonstrated an abuse of power and suppression of the judiciary under the pretext of maintaining state security. Second, the interventions were caused by several factors, namely unbalanced political contestation, ineffective checks and balances mechanisms between state institutions, the existence of potentially unconstitutional legislation, and the lack of awareness of other branches of power of constitutional ethics so that they can intervene in the judiciary and exceed the restrictions on government authority contained in the constitutions of each country.